



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO





Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA
			

- 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEDA
			

tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

KARO HUKUM	KABIN	ASISTEN	SEKDA
			

Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA
			

Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

25. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

Dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2


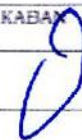


Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.832.296.976.495,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp491.989.218.495,00 (empat ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp429.888.172.626,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.185.681.722,00 (tujuh miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.456.586.737 (lima miliar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.458.777.410 (empat puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.346.006.348.000 (satu triliun tiga ratus empat puluh enam miliar enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.337.018.578.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar delapan belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp3.289.180.000 (tiga miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.289.180.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.854.056.189.424,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh empat miliar lima puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.397.041.304.439,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar empat puluh satu juta tiga ratus empat ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp684.344.820.456,00 (enam ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp597.838.120.038,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh ribu tiga puluh delapan rupiah).

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA
			

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.533.516.850,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp90.698.097.095,00 (sembilan puluh miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.626.750.000,00 (dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp218.803.281.733,00 (dua ratus delapan belas miliar delapan ratus tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.412.931.000,00 (lima miliar empat ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.451.556.159,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.318.403.826,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta empat ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp116.259.684.277,00 (seratus enam belas miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA
			

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.240.706.471,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp201.211.603.252,00 (dua ratus satu miliar dua ratus sebelas juta enam ratus tiga ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.886.603.252,00 (dua ratus miliar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan defisit sebesar Rp21.759.212.929,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12



- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp56.601.497.652,00 (lima puluh enam miliar enam ratus satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA
f	Q	y	k

- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.601.497.652,00 (lima puluh enam miliar enam ratus satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp34.842.284.723,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.842.284.723,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

KARO HUKUM	BABAN	ASISTEN	SEKDA
			

- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp(21.759.212.929,00) (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp21.759.212.929,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

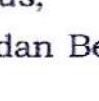
Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Gorontalo ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

Pasal 16

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Gorontalo ini.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA
f			k

Pasal 17

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo,
pada tanggal 26 Desember 2022
Pj. GUBERNUR GORONTALO,



HAMKA HENDRA NOER


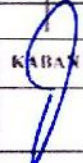


Diundangkan di Gorontalo,
pada tanggal 26 Desember 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



SYUKRI J. BOTUTIHE

PROVINSI GORONTALO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	491.989.218.495
4.1.01	Pajak Daerah	429.888.172.626
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	148.960.709.724
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	917.039.414
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	883.218.191
4.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	500.000
4.1.01.01.01.0003	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat	13.251.271
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	20.069.952
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	6.418.834.289
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	6.316.658.339
4.1.01.01.02.0002	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	500.000
4.1.01.01.02.0003	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat	41.334.350
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	60.341.600
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	52.650.456.339
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	51.983.272.615
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	91.891.240
4.1.01.01.03.0003	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat	377.646.241
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	197.646.243
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	111.341.943
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	109.841.943
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	500.000
4.1.01.01.04.0003	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat	500.000
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	500.000
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	242.065.420
4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	157.206.924
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	47.243.644
4.1.01.01.05.0003	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat	31.307.426
4.1.01.01.05.0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	6.307.426
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	25.733.025.367
4.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	25.498.475.818
4.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	80.106.710
4.1.01.01.06.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat	98.417.950
4.1.01.01.06.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	56.024.869
4.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	18.962.427.434
4.1.01.01.07.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	18.212.273.281
4.1.01.01.07.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	707.280.878
4.1.01.01.07.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat	28.432.135
4.1.01.01.07.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	14.441.140
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	8.220.246.956
4.1.01.01.08.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	7.715.559.714
4.1.01.01.08.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	463.605.864
4.1.01.01.08.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat	20.140.255
4.1.01.01.08.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	20.941.123
4.1.01.01.09	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	160.915.958
4.1.01.01.09.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	151.659.476
4.1.01.01.09.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	6.110.241
4.1.01.01.09.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat	500.000
4.1.01.01.09.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	2.646.241
4.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	25.480.856.604
4.1.01.01.10.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	35.214.883.829
4.1.01.01.10.0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum	1.000.000
4.1.01.01.10.0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	155.325.225
4.1.01.01.10.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	117.647.550

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA
			

PROVINSI GORONTALO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.01.11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	54.000.000
4.1.01.01.11.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	39.000.000
4.1.01.01.11.0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum	500.000
4.1.01.01.11.0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat	8.000.000
4.1.01.01.11.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	6.500.000
4.1.01.01.14	PKB-Mobil Roda Tiga	1.500.000
4.1.01.01.14.0001	PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi	500.000
4.1.01.01.14.0002	PKB-Mobil Roda Tiga-Umum	250.000
4.1.01.01.14.0003	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat	500.000
4.1.01.01.14.0004	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah	250.000
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	101.015.338.126
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	180.279.337
4.1.01.02.01.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	180.279.337
4.1.01.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	9.425.380.273
4.1.01.02.02.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	9.425.380.273
4.1.01.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	32.926.243.344
4.1.01.02.03.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	32.926.243.344
4.1.01.02.04	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	17.823.444
4.1.01.02.04.0001	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	17.823.444
4.1.01.02.05	BBNKB-Mobil Bus-Bus	137.353.553
4.1.01.02.05.0001	BBNKB-Mobil Bus-Bus	137.353.553
4.1.01.02.06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	19.573.879.223
4.1.01.02.06.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	19.573.879.223
4.1.01.02.07	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	5.226.918.125
4.1.01.02.07.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	5.226.918.125
4.1.01.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	402.813.299
4.1.01.02.08.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	402.813.299
4.1.01.02.09	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	87.232.232
4.1.01.02.09.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	87.232.232
4.1.01.02.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	32.859.415.296
4.1.01.02.10.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	32.859.415.296
4.1.01.02.11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	177.500.000
4.1.01.02.11.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	177.500.000
4.1.01.02.14	BBNKB-Mobil Roda Tiga	500.000
4.1.01.02.14.0001	BBNKB-Mobil Roda Tiga	500.000
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	80.032.573.967
4.1.01.03.01	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	208.164.638
4.1.01.03.01.0001	PBBKB Bahan Bakar Bensin	208.164.638
4.1.01.03.02	PBBKB-Bahan Bakar Solar	5.000.000
4.1.01.03.02.0001	PBBKB Bahan Bakar Solar	5.000.000
4.1.01.03.03	PBBKB-Bahan Bakar Gas	500.000
4.1.01.03.03.0001	PBBKB Bahan Bakar Gas	500.000
4.1.01.03.04	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	79.818.909.329
4.1.01.03.04.0001	PBBKB Bahan Bakar Lainnya	79.818.909.329
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	223.492.231
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan	223.492.231
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan	223.492.231
4.1.01.05	Pajak Rokok	99.656.058.578
4.1.01.05.01	Pajak Rokok	99.656.058.578
4.1.01.05.01.0001	Pajak Rokok	99.656.058.578
4.1.02	Retribusi Daerah	7.185.681.722
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.294.152.135
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	500.000.000
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	500.000.000

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA



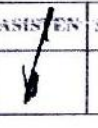

PROVINSI GORONTALO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01.12	Retribusi Pelayanan Pendidikan	2.794.152.135
4.1.02.01.12.0003	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ieknis	2.794.152.135
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.891.529.587
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.024.569.587
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	24.569.587
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1.000.000.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	866.960.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	866.960.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.000.000.000
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	750.000.000
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	750.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	500.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.456.586.737
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	5.456.586.737
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	5.456.586.737
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	5.456.586.737
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	49.458.777.410
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	50.000.000
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	50.000.000
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	50.000.000
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	50.000.000
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	50.000.000
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	50.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	6.750.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	1.650.000.000
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	1.650.000.000
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	100.000.000
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	100.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	4.077.777.410
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.077.777.410
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.077.777.410
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.000.000.000
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	500.000.000
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	500.000.000
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.468.500.000
4.1.04.12.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.792.500.000
4.1.04.12.01.0015	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	10.000.000
4.1.04.12.01.0016	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	500.000
4.1.04.12.01.0017	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat	5.000.000
4.1.04.12.01.0018	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	4.500.000
4.1.04.12.01.0019	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	70.000.000
4.1.04.12.01.0020	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	10.000.000
4.1.04.12.01.0021	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat	10.000.000
4.1.04.12.01.0023	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	300.000.000
4.1.04.12.01.0024	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	75.000.000
4.1.04.12.01.0025	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat	50.000.000
4.1.04.12.01.0026	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	75.000.000

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA

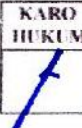
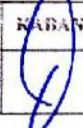


PROVINSI GORONTALO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.12.01.0027	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	20.000.000
4.1.04.12.01.0028	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	10.000.000
4.1.04.12.01.0029	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat	10.000.000
4.1.04.12.01.0030	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	10.000.000
4.1.04.12.01.0031	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	20.000.000
4.1.04.12.01.0032	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	10.000.000
4.1.04.12.01.0033	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat	10.000.000
4.1.04.12.01.0034	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	10.000.000
4.1.04.12.01.0035	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	150.000.000
4.1.04.12.01.0036	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	50.000.000
4.1.04.12.01.0037	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat	50.000.000
4.1.04.12.01.0038	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	50.000.000
4.1.04.12.01.0039	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	75.000.000
4.1.04.12.01.0040	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	70.000.000
4.1.04.12.01.0041	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat	50.000.000
4.1.04.12.01.0042	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	50.000.000
4.1.04.12.01.0045	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat	15.000.000
4.1.04.12.01.0046	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	15.000.000
4.1.04.12.01.0047	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	2.000.000
4.1.04.12.01.0048	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	1.000.000
4.1.04.12.01.0049	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat	1.000.000
4.1.04.12.01.0050	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	1.000.000
4.1.04.12.01.0051	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	350.000.000
4.1.04.12.01.0052	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum	50.000.000
4.1.04.12.01.0053	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	50.000.000
4.1.04.12.01.0054	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	50.000.000
4.1.04.12.01.0055	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	1.000.000
4.1.04.12.01.0057	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat	500.000
4.1.04.12.01.0058	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	500.000
4.1.04.12.01.0067	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi	500.000
4.1.04.12.02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	676.000.000
4.1.04.12.02.0001	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	15.000.000
4.1.04.12.02.0002	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	15.000.000
4.1.04.12.02.0003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	300.000.000
4.1.04.12.02.0004	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus	5.000.000
4.1.04.12.02.0005	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus	5.000.000
4.1.04.12.02.0006	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	10.000.000
4.1.04.12.02.0007	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	10.000.000
4.1.04.12.02.0008	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	5.000.000
4.1.04.12.02.0009	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	500.000
4.1.04.12.02.0010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	300.000.000
4.1.04.12.02.0011	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	10.000.000
4.1.04.12.02.0014	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga	500.000
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.000.000
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	1.000.000
4.1.04.13.01.0001	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.000.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	5.060.500.000
4.1.04.15.01	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	500.000
4.1.04.15.01.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	500.000
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	5.000.000.000
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	5.000.000.000
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	40.000.000
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	5.000.000

KARO HUKUM	KUBAN	ASISTEN	SEKDA
			

PROVINSI GORONTALO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.15.04.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Tetap	5.000.000
4.1.04.15.04.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.000.000
4.1.04.15.04.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.000.000
4.1.04.15.04.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.000.000
4.1.04.15.05	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	10.000.000
4.1.04.15.05.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK	10.000.000
4.1.04.15.06	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)	10.000.000
4.1.04.15.06.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKJ	10.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	30.000.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	30.000.000.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	30.000.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.337.018.578.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.337.018.578.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.337.018.578.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	18.872.388.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.415.510.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	15.973.882.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPON	0
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	735.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	200.816.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	233.739.000
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	1.047.706.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	973.834.635.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	973.834.635.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	165.500.063.000
4.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	29.854.837.000
4.2.01.01.03.0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	0
4.2.01.01.03.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	33.628.846.000
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	304.858.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	9.077.485.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	11.268.797.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	57.611.913.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Ingasi-Penugasan	23.753.327.000
4.2.01.01.03.0046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	0
4.2.01.01.03.0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	0
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	178.811.492.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	83.261.750.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-RQS Kinerja	3.603.750.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	79.378.949.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	3.256.500.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	164.573.000
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.800.000.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3.963.587.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	2.021.583.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	985.800.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	375.000.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0
4.2.01.02.01	DID	0

KARO HUKUM	NABAN	ASISTEN	SEKDA
			

PROVINSI GORONTALO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.02.01.0001	DID	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.289.180.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.289.180.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.289.180.000
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.289.180.000
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.289.180.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000.000
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	2.000.000.000
4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	2.000.000.000
4.3.03.01.02.0003	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMN	2.000.000.000
	Jumlah Pendapatan	1.832.296.976.495
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.397.041.304.439
5.1.01	Belanja Pegawai	684.344.820.456
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	398.252.550.060
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	302.578.977.370
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	278.966.949.950
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	23.612.027.420
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	30.401.257.149
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	29.436.502.590
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	964.754.559
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.006.356.214
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.006.356.214
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	21.897.123.634
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	21.217.498.606
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	679.625.028
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.069.154.646
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	6.069.154.646
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	18.947.973.365
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	18.207.519.945
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	740.453.420
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	970.036.867
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	962.447.621
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	7.589.246
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	534.488.658
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	534.180.300
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	308.358
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	5.940.507.773
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.940.507.773
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	726.668.596
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	669.910.211
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	56.758.385
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.180.005.788
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.009.730.632
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	170.275.156
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	159.838.343.006
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.284.000.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.284.000.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	158.554.343.006
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	154.330.343.010
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	4.223.999.996
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	98.581.453.723
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	8.053.931.723

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA
/	/	/	/

PROVINSI GORONTALO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	3.202.303.565
5.1.01.03.01.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.748.093.592
5.1.01.03.01.0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.098.109.550
5.1.01.03.01.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	5.425.016
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	79.378.949.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	79.378.949.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	164.573.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	164.573.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.256.500.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	3.256.500.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.937.500.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.937.500.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	2.790.000.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.790.000.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	26.090.436.860
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.434.300.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.434.300.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	96.284.004
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	96.284.004
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	99.725.364
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	99.725.364
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	127.595.004
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	127.595.004
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.079.735.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.079.735.000
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.860.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.860.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.215.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.215.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	164.000.004
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	164.000.004
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	342.818.844
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	342.818.844
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.750.978.640
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	144.412.760
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	3.629.340
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.536.540
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	7.598.400.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.920.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.920.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	183.612.100
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	78.576.806
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	78.576.806
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.999.994
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.999.994
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	89.556.866
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	89.556.866
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	1.039.234
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	1.039.234
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.039.234
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.039.234
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	71.691
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	71.691
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.965.347

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA

PROVINSI GORONTALO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.965.347
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	181.464
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	181.464
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	181.464
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	181.464
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.398.424.707
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	208.800.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	208.800.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.189.624.707
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.189.624.707
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	597.838.120.038
5.1.02.01	Belanja Barang	140.236.459.671
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	140.193.355.471
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.323.858.225
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.214.654.130
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	13.745.051.410
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	221.785.500
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.362.110.039
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	85.250.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	51.548.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	215.350.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.140.058.400
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	946.741.000
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	539.292.928
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	601.315.000
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	18.169.660
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	102.390.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.711.326.357
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.863.932.585
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.170.260.566
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	867.492.530
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	73.980.754
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.842.971.204
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	810.536.254
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.070.090.609
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	435.055.500
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	136.348.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	733.242.500
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	673.841.688
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.725.905.600
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.012.891.700
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	25.062.259.840
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	23.807.734.000
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.922.024.000
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	95.370.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.142.408.500
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.729.274.992
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	3.099.375.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.140.480.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	310.100.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	23.138.227.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	63.600.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	28.620.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	53.000.000

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SERDA

PROVINSI GORONTALO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	287.488.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	358.715.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	49.700.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	72.500.000
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	82.500.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	99.000.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	5.500.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	330.760.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	16.000.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	363.200.000
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	240.000.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	43.104.200
5.1.02.01.02.0007	Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)	250.000
5.1.02.01.02.0009	Belanja Pipa-Pipa Baja	4.082.500
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (JPVC)	38.771.700
5.1.02.02	Belanja Jasa	197.627.769.807
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	139.614.353.312
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.564.589.970
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	924.100.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	235.800.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	826.800.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	18.000.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	22.000.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	333.000.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	31.241.400.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	9.891.188.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	313.750.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.577.948.469
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.446.400.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	231.000.000
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	911.680.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	3.591.586.000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	60.000.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	25.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.212.280.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	994.400.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	24.196.507.300
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.344.730.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.858.283.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.247.228.000
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	69.570.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	203.080.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	45.600.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	6.000.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	178.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	102.400.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	35.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	90.000.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	9.700.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	3.100.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	335.396.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.366.700.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	112.154.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	15.000.000

KARO HUKUM	KABIN	ASISTEN	SERDA

PROVINSI GORONTALO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	15.500.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	113.400.000
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	132.678.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.819.060.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	570.286.764
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.599.282.247
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	10.337.310.894
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	266.950.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.204.955.350
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	201.750.000
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	68.905.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.330.104.318
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	206.600.000
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	8.250.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	75.000.000
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	30.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	35.705.624.648
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi Pbi	9.800.154.000
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	21.504.385.000
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.720.350.800
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	278.884.864
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	204.849.984
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	509.500.000
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	1.687.500.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	635.244.700
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	542.420.000
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	71.324.700
5.1.02.02.03.0008	Belanja Sewa Tanah Basah	0
5.1.02.02.03.0014	Belanja Sewa Tanah Pertanian	21.500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.566.810.000
5.1.02.02.04.0031	Belanja Sewa Peralatan Selam	19.350.000
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	175.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.649.750.000
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	35.000.000
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.235.750.000
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	12.000.000
5.1.02.02.04.0062	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Service	28.880.000
5.1.02.02.04.0103	Belanja Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	8.750.000
5.1.02.02.04.0116	Belanja Sewa Alat Penyimpan Perlenengkapan Kantor	2.400.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.249.480.000
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	75.000.000
5.1.02.02.04.0127	Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat	2.000.000
5.1.02.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	2.000.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	35.000.000
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	58.000.000
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	28.000.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	450.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.127.692.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	640.000.000
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	45.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	708.092.000
5.1.02.02.05.0018	Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	402.000.000
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	26.500.000
5.1.02.02.05.0038	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	240.000.000

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA

PROVINSI GORONTALO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	358.500.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Empat Lantai Lainnya	707.600.000
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	8.000.000
5.1.02.02.06.0130	Belanja Sewa Jaringan dengan Media Udara	8.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	305.000.000
5.1.02.02.07.0017	Belanja Sewa Naskah (Manuskrip)/Asli	300.000.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	5.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.760.178.400
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.217.619.500
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.423.127.840
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	27.500.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	900.000.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.600.000.000
5.1.02.02.08.0010	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	100.000.000
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	500.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	70.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	341.418.560
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	190.512.500
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	400.000.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	200.000.000
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	550.000.000
5.1.02.02.08.0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	240.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.360.000.000
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	510.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	350.000.000
5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	350.000.000
5.1.02.02.09.0018	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Kelembagaan Kepariwisata	150.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	291.950.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	95.600.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	158.540.000
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	37.810.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.701.030.930
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	125.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.545.770.930
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	30.260.000
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	10.800.000
5.1.02.02.14.0002	Belanja insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.800.000
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	541.085.817
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	129.000.000
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	412.085.817
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	25.746.989.941
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	783.475.000
5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	296.507.000
5.1.02.03.01.0007	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	386.968.000
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	100.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.155.626.350
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	42.500.000
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	20.000.000
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	20.000.000
5.1.02.03.02.0017	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	144.000.000
5.1.02.03.02.0020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	30.000.000

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA

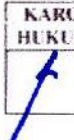
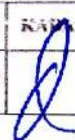

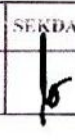
PROVINSI GORONTALO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	60.000.000
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	3.750.000
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	25.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	850.250.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.361.500.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	21.500.000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	989.920.000
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	69.750.000
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	6.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	463.586.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	10.000.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	110.594.500
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	778.890.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	74.000.000
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	82.400.000
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	13.000.000
5.1.02.03.02.0250	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	9.000.000
5.1.02.03.02.0376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	170.000.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	22.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	537.410.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	179.400.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	1.000.000
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	110.175.850
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.127.369.091
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	8.054.758.691
5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	175.000.000
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	457.650.400
5.1.02.03.03.0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	800.000.000
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	440.000.000
5.1.02.03.03.0053	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	99.960.000
5.1.02.03.03.0060	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	100.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.680.519.500
5.1.02.03.04.0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	2.051.042.000
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.100.000.000
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.513.977.500
5.1.02.03.04.0078	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal	3.000.000
5.1.02.03.04.0105	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	12.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	123.040.701.935
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	122.641.359.935
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	115.365.894.935
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1.357.025.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.918.440.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	399.342.000
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa/Ali Luar Negeri	399.342.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.302.060.580
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.036.600.580
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perombaan	940.500.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	195.000.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	8.899.100.580
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	62.000.000

KARO HUKUM	KABANG	ASISTEN	SERDA

PROVINSI GORONTALO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.265.460.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.045.460.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	220.000.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	72.534.138.104
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	72.534.138.104
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	72.534.138.104
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	26.350.000.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	26.350.000.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	26.350.000.000
5.1.03	Belanja Bunga	2.533.516.850
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	2.533.516.850
5.1.03.04.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	2.533.516.850
5.1.03.04.01.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	2.533.516.850
5.1.05	Belanja Hibah	90.698.097.095
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	72.875.000.000
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	72.875.000.000
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	72.875.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	16.750.964.017
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.255.886.992
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.255.886.992
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.612.000.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.612.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.173.077.025
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.173.077.025
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	710.000.000
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	710.000.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.072.133.078
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.072.133.078
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.072.133.078
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	21.626.750.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	80.000.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	10.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	10.000.000
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	70.000.000
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	70.000.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	17.529.500.000
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	5.629.500.000
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	5.629.500.000
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	11.900.000.000
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	11.900.000.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.158.750.000
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	630.500.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	630.500.000
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	527.750.000
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	527.750.000
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.859.000.000
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.859.000.000
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.859.000.000
5.2	BELANJA MODAL	218.803.281.733

KARO HUKUM	KABIN	ASISTEN	SEKDA
			


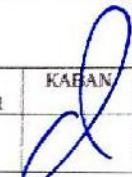

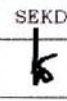
PROVINSI GORONTALO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.412.931.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	5.412.931.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	3.662.931.000
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	1.215.000.000
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	2.447.931.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	1.750.000.000
5.2.01.01.03.0006	Belanja Modal Tanah Lapangan Terhang	1.000.000.000
5.2.01.01.03.0012	Belanja Modal Tanah untuk Makam	750.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.451.556.159
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	14.956.700
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	14.956.700
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	14.956.700
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	7.537.128.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.586.328.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.167.500.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.267.078.000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	892.400.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	223.850.000
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	35.500.000
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	2.950.800.000
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	2.950.800.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	136.000.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	136.000.000
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	126.000.000
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	10.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.525.871.500
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.525.871.500
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	991.091.500
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	534.780.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.063.697.488
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.943.246.592
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	187.750.870
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.755.495.722
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.253.488.696
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.729.289.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	108.680.700
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	885.251.460
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	17.675.300
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.494.352.236
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	18.240.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	866.962.200
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	255.985.200
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	73.690.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	78.000.000
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	255.350.000
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	62.607.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	121.330.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.502.553.700
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.740.326.700
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	180.327.700

KARO HUKUM	KABAT	ASISTEN	SEKDA

PROVINSI GORONTALO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.538.369.000
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	21.630.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	762.227.000
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	122.227.000
5.2.02.06.02.0009	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	640.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.000.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	4.000.000
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	4.000.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	11.174.830.250
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	3.270.426.250
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	40.772.000
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	80.000.000
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	3.149.654.250
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	7.904.404.000
5.2.02.08.03.0002	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Matematika	0
5.2.02.08.03.0006	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi IPA Atas	1.890.000.000
5.2.02.08.03.0014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	6.014.404.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.927.303.096
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.275.682.412
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	100.742.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.541.662.412
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	633.278.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	651.620.684
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	511.032.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	46.327.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	94.261.684
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	48.540.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	17.640.000
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	10.500.000
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	7.140.000
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	30.900.000
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	30.900.000
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	70.120.000
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	70.120.000
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	4.120.000
5.2.02.16.01.0002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	66.000.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.170.900.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.170.900.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.170.900.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.275.655.425
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.275.655.425
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.275.655.425
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.000.000.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.000.000.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.000.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.318.403.826
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	39.641.063.750
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	39.462.854.750
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.445.000.000
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	150.000.000
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	33.357.408.000
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	15.000.000

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA
			

PROVINSI GORONTALO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0
5.2.03.01.01.0027	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	817.224.750
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	1.000.000.000
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	998.222.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	200.000.000
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	180.000.000
5.2.03.01.01.0034	Belanja Modal Bangunan Gedung Pakwik	100.000.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	200.000.000
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	178.209.000
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0
5.2.03.01.02.0005	Belanja Modal Asrama	178.209.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.277.340.076
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.277.340.076
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	17.500.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.859.840.076
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	400.000.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	116.259.684.277
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	81.831.093.277
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	73.131.093.277
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	57.611.595.350
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	1.489.997.927
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	14.029.500.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	8.700.000.000
5.2.04.01.02.0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	8.600.000.000
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	100.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	34.138.591.000
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	23.953.327.000
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	23.953.327.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	900.000.000
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	900.000.000
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	176.000.000
5.2.04.02.06.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	176.000.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	9.109.264.000
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	207.614.000
5.2.04.02.07.0004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	5.711.650.000
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	3.190.000.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	15.000.000
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	15.000.000
5.2.04.03.01.0002	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	0
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	15.000.000
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	0
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	75.000.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	75.000.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	75.000.000
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	200.000.000
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	200.000.000
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	200.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.240.706.471
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	285.000.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	234.000.000

KARO HUKUM	KASAN	ASISTEN	SEKDA

PROVINSI GORONTALO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	234.000.000
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	51.000.000
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	51.000.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	100.000.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	100.000.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	100.000.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.855.706.471
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.855.706.471
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.855.706.471
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	120.000.000
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	70.000.000
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	70.000.000
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	70.000.000
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	50.000.000
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	50.000.000
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	50.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	37.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	37.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	37.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	37.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	37.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	201.211.603.252
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	200.886.603.252
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	200.886.603.252
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	150.512.435.388
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	150.512.435.388
5.4.01.01.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	50.374.167.864
5.4.01.01.02.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	50.374.167.864
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	325.000.000
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	325.000.000
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	325.000.000
5.4.02.03.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	325.000.000
	Jumlah Belanja	1.854.056.189.424
	Total Surplus/(Defisit)	(21.759.212.929)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	56.601.497.652
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	56.601.497.652
6.1.01.05	Penghematan Belanja	56.601.497.652
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	6.000.000.000
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	1.000.000.000
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	5.000.000.000
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	50.601.497.652
6.1.01.05.02.0003	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	15.000.000.000
6.1.01.05.02.0005	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian	5.000.000.000
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	10.601.497.652
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	20.000.000.000
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	56.601.497.652
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	34.842.284.723
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA

PROVINSI GORONTALO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	29.842.284.723
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	29.842.284.723
6.2.03.04.01	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-langka Pendek	29.842.284.723
6.2.03.04.01.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-langka Pendek	29.842.284.723
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	34.842.284.723
	Pembiayaan Netto	21.759.212.929
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Pj. Gubernur Gorontalo



HAMKA HENDRA NOER

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA
